

Presiden Jokowi Bantah Tuduhan Sandiaga Bahas Politik di Istana

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo membantah tuduhan yang menyebut dirinya berbicara soal politik saat bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/).

Jokowi menegaskan, dalam pertemuannya dengan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, dirinya hanya membahas soal pariwisata.

"Tidak membicarakan politik," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Senayan Park, Jakarta, Rabu (2/8).

Hal yang sama pun disampaikan Jokowi saat ditanya isi pembicaraannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurut Presiden Jokowi, Prabowo melaporkan hasil kunjungan dan pembicaraannya dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman terkait rencana kunjungannya ke Indonesia.

"Ya laporan mengenai kunjungan menteri pertahanan Arab Saudi," kata Jokowi.

Sebelumnya, Sandiaga mengaku berbicara mengenai pariwisata dan politik saat berbincang empat mata dengan Presiden Jokowi di Istana.

"Pertemuannya kami hanya berdua membahas pariwisata. Tapi juga ada diskusi ringan lah. Diskusi-diskusi

ringan, diskusi tipis-tipis tentang politik," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (2/8).

Masalah politik yang dibahas keduanya antara lain soal kegiatan Sandiaga setelah bergabung dengan PPP. Presiden Jokowi menitipkan sejumlah pesan untuk partai berlambang kalpa'ah itu.

"Nanti tentunya (pesan) akan saya sampaikan ke Pak Mardiono. Dan ada beberapa harapan juga agar PPP terutama saya yang ada di garis terdepan menjaga narasi politik kita itu jangan sampai kita terpolarisasi. Tapi kita bersatu dan kita jaga keutuhan bangsa," kata Sandiaga Uno.

Selain itu, kata Sandiaga, pembicaraan dengan Presiden Jokowi juga membahas soal bakal calon presiden (cawapres) untuk bakal capres dari PDI Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo. Pembahasan tersebut dalam rangka pembahasan mengenai Sandiaga yang masuk bursa bakal cawapres bagi Ganjar

"Dibahas juga (soal namanya masuk dalam bursa cawapres). Dan saya menyampaikan belum ada update dan ini masih menunggu keputusan dari PDI-P, dari Bu Mega (Megawati Soekarnoputri)," ungkapnya. • mei

Ganjar Pranowo Optimis Santriwati Dapat Songsong Indonesia Emas 2045

CIREBON (IM) - Bakal calon presiden (Bacapres), Ganjar Pranowo, menegaskan komitmennya dalam mendukung kesetaraan gender. Ganjar optimis bahwa kaum santriwati bisa menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal ini ditegaskan Ganjar usai berdialog bersama sejumlah santriwati dalam Seminar Nasional Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan tema "Transformasi dan Penguatan Pendidikan Karakter di Pesantren Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045", yang digelar di GOR Mbah Muqoyim Buntet Pesantren, Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Selasa (1/8) malam.

"Bagaimana kemudian dia harus mendorong dirinya sebagai perempuan muda yang akan nanti berada di masyarakat, dia tidak mau kalah juga sama laki-laki. Jadi kesetaraannya bagus," kata Ganjar, dalam keterangannya.

Ganjar meyakini ilmu agama dan spiritualitas santriwati Indonesia patut diacungi jempol.

Terlebih mereka belajar dari roma kiai dan ulama-ulama yang selalu mengajarkan konsep Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai toleransi antarumat beragama.

Ganjar juga tidak meragukan kualitas dan intelektualitas santriwati. Sebab kini sudah banyak

pondok pesantren yang menawarkan pendidikan teknologi berbasis digital dengan segala prestasinya.

"Saya menemukan suasana kebatinan yang optimis dari anak-anak Indonesia, dari pondok pesantren yang tidak kalah juga dengan pengetahuan masyarakat yang ada di luar. Dia mengerti persis apa yang dilakukan," ujarnya.

Dengan bekal keyakinan tersebut, Ganjar menekankan pentingnya pendidikan kepada ribuan santri/santriwati yang hadir. Apalagi pemerintah saat ini mendukung kemudahan akses pendidikan lewat berbagai program beasiswa.

Dalam kesempatan itu, Ganjar mengajak seluruh santriwati di Indonesia untuk tekun belajar dan meraih pendidikan setinggi-tingginya dengan karakter yang kuat.

Sehingga santriwati menjadi generasi unggul yang mampu mendorong perwujudan Indonesia Emas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Indeks ketimpangan gender (IKG) di Jateng tahun 2022 tercatat 0,371 turun 0,006 poin dibandingkan 2021 yang mencapai 0,377. Penurunan ini konsisten turun sejak tahun 2018. • han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RILIS PENGUNGKAPAN TERSANGKA PENYELUDUPAN MANUSIA

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim (tengah) didampingi Dirwasdakim I Nyoman Surya Mataram (kiri) dan Koor Penyidikan Hajar Aswad (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan saat rilis pengungkapan tersangka kasus penyeludupan manusia yang masuk proses peradilan di Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Rabu (2/8). Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menetapkan seorang perempuan dengan inisial ODG dari PT MCP sebagai tersangka atas kasus dugaan percobaan penyeludupan manusia yang berawal dari temuan paspor sejumlah WNI dengan cap palsu keimigrasian untuk mengajukan visa ke Kedutaan Besar Amerika Serikat.

KPK OTT PEJABAT BASARNAS

Panglima: Kalau Saya Perintahkan Batalyon Geruduk KPK, Itu Intervensi

Panglima TNI menegaskan bahwa sikap TNI mengambil alih penyidikan terhadap Kabasarnas dan Koorsmin Basarnas sudah sesuai undang-undang.

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membantah tuduhan yang menyebut anak buahnya mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan dugaan korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Yudo menyatakan, kedatangan aparat TNI ke KPK bukan untuk mengintervensi karena mereka yang datang merupakan para ahli hukum

yang memiliki gelar sarjana dan magister di bidang hukum.

"Yang hadir di sana itu pakar hukum semua lho, kalau saya intervensi itu merintahkan batalyon mana saya suruh geruduk ke situ, itu namanya intervensi," kata Yudo di Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (2/8).

Yudo menekankan bahwa sikap TNI mengambil alih penyidikan terhadap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi dan KoorKoordinasi

Administrasi (Kooramin) Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto dari KPK sudah sesuai undang-undang. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada publik untuk membuang prasangka bahwa pengusutan kasus ini akan terhenti setelah ditangani oleh TNI.

"Jangan punya perasaan seolah-olah itu diambil TNI, (lalu) dilindungi, tidak, undang-undangnya menuntut pada undang-undang gitu lho, undang-undang yang menyatakan itu, bukan kami yang meminta," kata Yudo.

Diberitakan sebelumnya, Danpuspom TNI beserta jajarannya sempat mendatangi Gedung KPK untuk berkoordinasi usai lembaga antirasuah

itu mengumumkan Henri dan Afri sebagai tersangka kasus dugaan suap. Usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI dan menyebut soal kekhilafan jajarannya karena proses hukum perwira TNI aktif adalah kewenangan dari Puspom TNI.

Kemudian, pimpinan dan pejabat struktural KPK mendapatkan kiriman bunga misterius berisi kalimat bernada teror. Kiriman karangan bunga itu muncul tak lama usai KPK menetapkan Henri Alfandi dan Afri sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Basarnas.

Berdasarkan Foto yang beredar, karangan bunga dikirim oleh oknum yang menyebut diri sebagai "Tetangga". Karangan itu berisi pesan "Selamat Atas Keberhasilan Bapak Alexander Marwata Memasuki Pekarangan Tetangga". Sementara itu, karangan bunga lainnya bertuliskan, "Selamat Atas

Keberhasilan Anda Bapak Asep Guntur Rahayu Memasuki Pekarangan Tetangga".

Untuk diketahui, Alexander Marwata adalah Wakil Ketua KPK yang mengemukakan status tersangka Kepala Basarnas Henri Alfandi dan bawahannya Afri, pada Rabu (26/7).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan bahwa pimpinan KPK dalam beberapa hari terakhir mendapat banyak ancaman, teror yang menyangkut nyawa hingga kekerasan. Pesan-pesan teror itu disampaikan melalui aplikasi WhatsApp maupun medium lain ke rumah pimpinan dan pejabat struktural KPK.

"Kami dalam beberapa hari ini sedang banyak mendapat tantangan dan ancaman/teror nyawa dan kekerasan, yang disampaikan ke WhatsApp maupun karangan bunga yang dikirim ke rumah rumah struktural dan pimpinan KPK karena memberantas korupsi," kata Ghufron kepada wartawan, Senin kemarin. • han

KPK Sita Uang Suap Rp80 Juta dari Dua Anggota DPRD Jambi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp80 juta dari Bustami Yahya dan M Khairil. Keduanya anggota DPRD Jambi periode 2019-2024. Uang sebesar Rp80 juta itu disita karena diduga suap dari mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, terkait pengesahan RAPBD tahun 2017-2018.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, proses penyitaan uang sebesar Rp80 juta itu dilakukan saat tim penyidik memeriksa Bustami Yahya dan M Khairil di Mapolda Jambi, pada Selasa (1/8). Kedua Anggota DPRD Jambi itu juga dikonfirmasi tim penyidik soal uang yang diterima dari Zumi Zola.

"Kedua saksi hadir dan didalam pengetahuan antara lain terkait dengan dugaan penerimaan uang oleh para saksi dari Zumi Zola atas pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (2/8).

"Sekaligus dari para saksi juga dilakukan penyitaan uang dengan jumlah Rp80 juta," ujarnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan 28 tersangka baru terkait kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Penetapan tersangka terhadap 28 mantan anggota DPRD Jambi tersebut merupakan hasil pengembangan kasus suap mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Dari 28 mantan anggota DPRD yang telah ditetapkan tersangka tersebut, baru 17 orang yang dilakukan proses penahanan.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Salah satu tersangka perdana dalam perkara ini yaitu, mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Selain Zumi Zola, KPK juga menetapkan para pejabat pada Pemrov Jambi lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. Bahkan, anggota DPRD Jambi juga sudah banyak dijerat dalam perkara ini. Mayoritas para tersangka sudah diputus bersalah oleh pengadilan. • han

MA Tolak Kasasi Mardani Maming

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan terdakwa kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di Tanah Bumbu, Mardani H Maming.

Maming mengajukan kasasi lantaran hukumannya diperberat menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin.

"Tolak," demikian petikan putusan kasasi MA yang dikutip Hakim Agung Suhadi pada Selasa (1/8).

Dalam mengadili perkara ini, Hakim Agung Suhadi didampingi oleh Hakim Agung Agustinus Purnomo Hadi dan Hakim Agung Suharto.

Majelis Hakim menghukum Mardani Maming membayar uang pengganti sebesar Rp 110.604.371.752 subsidi 4 tahun penjara. Diberitakan, Pengadilan

Tinggi Banjarmasin memperberat hukuman mantan Bupati Tanah Bumbu itu menjadi 12 tahun penjara dari vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin dalam kasus tersebut.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mardani H Maming oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta," demikian bunyi putusan PT Banjarmasin yang dikutip dari Direktori Putusan MA, Senin (3/4) lalu.

Maming dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

FOTO: ANTARA



PELUNCURAN LAYANAN EAZY PASSPORT DI DUMAI

Petugas imigrasi melayani pemohon saat peluncuran Layanan EAZY Passport di Kota Dumai, Riau, Rabu (2/8). Ditjen Imigrasi Layan Kumham RI meluncurkan Layanan EAZY Passport di Riau yang dipusatkan di Kota Dumai dengan dihadiri sejumlah kantor pelayanan imigrasi seperti Pekanbaru, Siak, Bengkalis, Bagansiapiapai dan Selat Panjang guna mengurai antrean pemohon terutama yang mendaftar secara online.

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUKSES OSEAN KHATULISTIWA LINE

Dengan ini, Direksi PT Sukses Osean Khatulistiwa Line, berkodudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023
Waktu : Pukul 16.00 WIB – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 51,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Agenda :
1. Persetujuan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya penanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Mohon kehadirannya tepat waktu.

Bahan-bahan yang perlu memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 03 Agustus 2023
Direksi Perseroan
PT Sukses Osean Khatulistiwa Line

PENGUMUMAN
UNDANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Kami Direksi Perseroan PT. Van Aroma mengundang Bapak, Ibu, Saudara/I, Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
Waktu : Pukul 10.30 WIB – selesai
Tempat : PT. Van Aroma
Jalan Raya Cicadas No. 16, RT.04, RW. 04,
Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Agenda Rapat :
1. Pembagian Dividen tahun buku 2022
2. Persetujuan Perubahan Susunan Komisaris
3. Persetujuan Pinjaman kredit

Kami sangat berharap agar para pemegang saham PT. Van Aroma dapat menghadiri RUPS LB tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran para pemegang saham, kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 3 Agustus 2023
Hormat Kami
TTD
SANDEEP TEKRIWAL
Presiden Direktur

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") Direksi Perseroan Terbatas PT Cahaya Prima Makmur berkodudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan sebagian besar saham Perseroan oleh Salah Satu Pemegang Saham, langsung dari Para Pemegang Saham lainnya, sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.

Bagi Para Kreditor yang berkeberatan atas rencana pengambilalihan tersebut dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Direksi Perseroan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman ini. Jika dalam waktu tersebut tidak mengajukan keberatan, maka dianggap telah menyetujui.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 3 Agustus 2023
Direksi
PT Cahaya Prima Makmur